

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum kehidupan masyarakat. Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batubara. Pelaku pertambangan yang tidak memiliki izin diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tindakan dalam pertambangan batu kapur ini menyebabkan kerusakan lingkungan juga memicu berbagai dampak negatif. Hasil penelitian ini membahas bagaimana upaya penegak hukum yang dilakukan Kepolisian Polsek Pangkalan dalam mengatasi pertambangan yang belum memiliki izin di Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan dan membahas bagaimana dampak penyebab terjadinya pencemaran udara di Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan akibat dari pertambangan Batu Kapur ini. Metode penelitian yuridis empiris yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini dengan sumber data primer terdiri dari masyarakat sekitar, pekerja tambang, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu upaya penegak hukum belum maksimal dalam mengatasi pertambangan yang belum memiliki izin karena banyaknya perlawanan dari masyarakat maka perlu upaya lebih lanjut agar masyarakat sadar akan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Penegak Hukum, Pertambangan, Pencemaran Udara



KARAWANG

ABSTRACT

Law enforcement is the process of making efforts to enforce or function legal norms in real terms as a guideline for behavior in legal relations in community life. Mining crimes are acts that are prohibited by regulations that are subject to sanctions for perpetrators, in order to protect mineral and coal mining activities and businesses. Mining actors who do not have a permit are regulated in Article 158 of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. Actions in limestone mining cause environmental damage and also trigger various negative impacts. The results of this study discuss how law enforcement efforts are carried out by the Pangkalan Police in dealing with mining that does not yet have a permit in Tamansari Village, Pangkalan District and discuss the impact of air pollution in Tamansari Village, Pangkalan District due to this limestone mining. The empirical legal research method used to answer the problems in this study with primary data sources consisting of the surrounding community, mine workers, community leaders, and law enforcement officers such as the police. The conclusion that can be drawn is that law enforcement efforts have not been maximized in dealing with mining that does not yet have a permit because of the many resistances from the community, so further efforts are needed so that the community is aware of the law in Indonesia.

Keyword: Law Enforcement, Mining, Air Pollution

